



MELAWAN STRATEGI BARU ISIS PASCA-TEROR PARIS

Adirini Pujayanti*)

Abstrak

Pasca-serangan teroris ISIS di Paris, sejumlah negara secara mandiri maupun koalisi memperkuat serangan militer ke markas ISIS di Suriah dan Irak. Perang virtual antara pihak yang pro dan kontra terhadap ISIS juga terjadi di dunia maya karena ISIS diketahui banyak memanfaatkan media sosial dalam melaksanakan kegiatannya. Strategi baru ISIS mengembalikan anggotanya ke negara asal harus diantisipasi negara-negara penerima untuk menghindari munculnya serangan teror baru di banyak negara.

Pendahuluan

Tindakan teroris Pasca-Paris yang dilakukan simpatisan ISIS terus terjadi di seluruh dunia. Di Amerika Serikat (AS), penembakan massal terjadi di San Bernardino dan menewaskan warga sipil. Aksi serupa juga terjadi di London berupa penusukan terhadap warga sipil di stasiun kereta api bawah tanah. Akhirnya, teror yang sama dalam bentuk serangan bom terjadi di Yaman, menewaskan gubernur wilayah Aden. Dengan kedudukannya sebagai markas ISIS, Suriah dan Irak menjadi sasaran kekuatan besar dunia dalam perang melawan terorisme. Dalam konteks ini, perubahan strategi perang ISIS yang ditengarai terjadi dari medan pertempuran ke dalam bentuk penyusupan ke negara masing-masing untuk menciptakan arena perang baru harus diantisipasi.

Strategi Amerika Serikat

Koalisi negara-negara Barat pimpinan AS serta Rusia melakukan intervensi militer melalui

serangan udara pada sumur-sumur minyak yang diyakini menjadi salah satu sumber dana ISIS. Kelompok teroris ini memiliki sumber dana sendiri tanpa mengandalkan bantuan atau sumbangan dana dari simpatisannya. Pemasukan ISIS di akhir 2015 mencapai 80 juta dolar AS, sebagian dikumpulkan dari pajak di wilayah yang mereka kuasai. Penjualan minyak menyumbang 43 persen dari pendapatan tersebut dan sisanya sekitar 7 persen berasal dari sumber-sumber lain, termasuk penyelundupan narkoba dan penjualan listrik.

AS menyadari bahwa mengandalkan serangan udara semata-mata tidak dapat mengalahkan ISIS. Oleh karena itu, AS menginginkan Suriah dan negara-negara Arab mendukung serangan udara koalisi dengan pengerahan pasukan darat. Di tengah-tengah kritik masyarakat AS akan kelambanan pemerintahnya menindaklanjuti teror ISIS, Presiden Obama menyatakan tidak akan

*) Peneliti Madya Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: adirini.pujayanti@dpr.go.id



menggunakan cara lama dengan mengirimkan pasukan darat AS ke Suriah dan Irak untuk melawan ISIS. AS dan sekutunya menghindari pengerahan pasukannya dalam serangan darat dalam serangkaian perang besar yang memakan waktu panjang.

Pengerahan pasukan darat akan menjadikan upaya melawan ISIS perang besar dan lama. ISIS bukan merupakan negara tetapi kelompok militan yang ada di dalam negara. Dengan demikian bila terjadi penyerangan dengan mudah mereka dapat melebur ke dalam masyarakat menjadi rakyat sipil biasa. Saat kondisi aman mereka kembali berkumpul membentuk kelompok militan. Sementara penyerangan ke Irak dan Suriah yang merupakan negara berdaulat tentu akan menimbulkan konflik baru, seperti yang saat ini terjadi antara Turki dan Irak.

Sebaliknya, bagi negara-negara Arab, pengerahan pasukan darat negara-negara Arab menjadi penting karena *pertama*, apabila seluruh negara Arab turut memerangi ISIS maka tidak dimungkinkan bagi ISIS menggunakan wilayah salah satu negara Arab untuk menyerang negara Arab lainnya. *Kedua*, negara Arab paling mengenal budaya, mengenali kelompok yang bersengketa dan medan tempur.

AS juga melakukan upaya melemahkan ISIS secara politik melalui berbagai perundingan yang disebut AS sebagai *Vienna Process*. AS meyakini jika solusi politik bisa mengakhiri pertempuran antara rezim Suriah dan oposisi, pada gilirannya akan memudahkan pengerahan pasukan darat negara-negara Arab untuk mengalahkan ISIS. Namun demikian, sebelum semua negara Arab bergabung dan melakukan serangan darat, pihak koalisi Barat menginginkan adanya kesepakatan bahwa Suriah yang tergabung dalam pasukan negara-negara Arab adalah Suriah tanpa rezim as-Saad. Perundingan perwakilan kelompok oposisi Suriah menuju proses transisi pasca-rezim Presiden Bashar al-Assad terus dilakukan dengan membahas langkah-langkah politik yang mengarah pada pemilu.

AS menyerukan perang maya (*cyber war*) secara terbuka terhadap ISIS. Presiden Obama meminta para pakar IT di *Silicon Valley* membantu menangani ancaman dari kelompok militan yang menggunakan media sosial tersebut. Upaya dan langkah ini didorong oleh keyakinan bahwa bahaya terorisme ISIS telah memasuki fase baru dengan menggunakan media sosial untuk merekrut simpatisan

mereka. Bagi mereka, teknologi informasi berbasis internet yang berkarakter egaliter meretas pakem baku organisasi yang hierarkis, termasuk bagi organisasi teroris. Komunikasi menjadi lebih cair dan lentur. Karakter egaliter menarik simpatisan untuk menyokong imaji delusional tentang suatu komunitas dunia dunia yang utopis dan seolah-olah layak diperjuangkan sekalipun dengan cara-cara teror dan melawan hukum.

Sebuah strategi populer yang digunakan ISIS untuk propaganda lewat media sosial adalah menggunakan "*twitter bombs*" yang terbukti mampu meningkatkan simpatisan mereka, terutama kaum muda dengan cepat. Dengan cara ini, ISIS mempengaruhi pikiran, membangun radikalisme, sifat pembangkangan dan perlawanan dibungkus dogma-dogma agama. Belakangan tersiar aktivitas taktis ISIS di internet cenderung berpindah ke *dark web*, yakni konten *world wide web* yang berada dalam *darknets*. *Darknet* adalah jalur internet yang pengunjungnya tidak dapat dideteksi. Komunitas peretas internasional telah bersatu mengajak seluruh netizen dunia untuk bergabung dalam gerakan "*ISIS Trolling Day*" menyerang akun-akun yang diasosiasikan terkait ISIS di media sosial. Netizen diajak bergabung dengan mengunggah (*posting*) konten apapun di media sosial yang berisi serangan terhadap ISIS, berupa meme, komik, satir, video dan sebagainya. Lebih dari 5.500 akun twitter yang dicurigai terkait dengan ISIS dilumpuhkan.

Presiden Obama menegaskan gerakan ISIS adalah terorisme dan bukan bagian dari ajaran Islam. Penegasan ini menjadi penting untuk mencegah tindakan balas dendam terhadap umat muslim dan menguatnya Islamophobia. Sementara itu, Arab Saudi telah membentuk koalisi aliansi militer negara muslim. Koalisi ini akan berperan dalam mengatasi masalah dunia Islam terkait dengan terorisme dan akan menjadi mitra dalam perang di seluruh dunia. Indonesia menegaskan tidak bergabung dalam koalisi ini karena bertentangan dengan konstitusi.

Kondisi Indonesia

Saat ini ISIS dinilai telah melakukan perubahan strategi serangannya. Pemimpin ISIS meminta kepada para pengikut dan simpatisannya di berbagai negara untuk tidak pergi ke Suriah atau Irak. Mereka diminta kembali ke negara masing-masing dan melancarkan serangan di sana. Indonesia

harus mewaspadai strategi ini karena dalam sejarah Indonesia aspirasi kelompok yang menginginkan berdirinya suatu *Islamic State* bukan sesuatu yang baru dan diakui. Hingga kini, fakta masih dapat ditemui setidaknya-tidaknya untuk sebagian bahwa aspirasi suatu *Islamic State* di Indonesia masih hidup dikalangan masyarakat Indonesia karena dianggap sebagai panggilan jihad.

Pandangan ini tidak berlebihan karena potensi terorisme di Indonesia selama tahun 2015 belum berkurang. Di Indonesia perekrutan simpatisan ISIS melalui facebook cenderung menurun mulai pertengahan tahun 2015. Namun demikian, penggunaan aplikasi percakapan melalui telepon, seperti *WhatsApp*, *Telegram*, dan *Zello* ditengarai telah meningkat. Ketiga aplikasi ini menjadi favorit di kalangan kelompok ekstrim Indonesia, termasuk para narapidana terorisme yang masih berada di dalam penjara, untuk berkomunikasi dengan Timur Tengah dan juga dengan sesama pendukung ISIS di Indonesia. Penggunaan aplikasi seperti *Telegram* oleh kelompok ekstrem menyulitkan aparat untuk melakukan penyadapan.

Badan Intelijen Indonesia (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menyatakan sekitar 169 WNI baru saja kembali dari Suriah usai bergabung dengan ISIS. Banyak di antara mereka kini berada di Ibukota DKI Jakarta, sedangkan sisanya menyebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat menyatakan pihaknya belum memiliki data WNI keluaran ISIS yang berada di wilayahnya. Namun demikian, Pemprov DKI telah menegaskan perlunya kesiagaan. Upaya koordinasi lebih intensif dengan pihak terkait untuk mengantisipasi aksi terror merefleksikan penegasan tersebut.

BNPT telah melakukan berbagai upaya agar kembalinya WNI kombatan ISIS itu tidak membawa dampak negatif bagi negara. Saat ini mereka tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Jakarta dan berbaur dengan masyarakat. BNPT, Kemlu dan Imigrasi telah melakukan identifikasi yang ditindaklanjuti dengan pemetaan terkait jaringan yang ada di Indonesia. Di sisi lain, sejumlah militan dari luar negeri sudah masuk ke Indonesia, 9 di antaranya dari etnis Uyghur, 4 sudah ditangkap di Sulawesi Tengah dan 5 orang bergabung dengan Kelompok Santoso.

BNPT mengidentifikasi ada tiga kelompok besar di Indonesia yang siap melakukan aksi teror. Ketiga kelompok tersebut adalah Kelompok Mujahidin Indonesia Timur

(MIT) di bawah kendali Santoso, kelompok yang terpengaruh Abu Bakar Ba'asir, dan kelompok Amman Abdurrahman. Jumlah anggota ketiga kelompok tersebut belum diketahui secara pasti, namun yang jelas mereka telah berbaiat setia kepada ISIS. Kelompok pendukung ISIS ini diketahui secara terbuka telah mengancam akan menyerang pimpinan Polri, Panglima TNI dan pejabat Detasemen Khusus 88 sebagai tanggapan kebijakan Indonesia bergabung dengan negara-negara koalisi untuk membasmi kelompok *Islamic State* pro ISIS di kawasan Asia Tenggara. Kelompok Santoso di Poso diketahui memiliki senjata anti tank, secara rutin menerima kucuran dana maupun bentuk bantuan lainnya. Polri meyakini Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Timur dan Lampung merupakan basis simpatisan ISIS.

Menurut kepala BNPT Saud Usman, salah satu yang agak menghambat upaya BNPT dalam antipasi terorisme di Indonesia adalah masih lemahnya UU Terorisme no 15 tahun 2003 karena dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi keamanan saat ini. Dalam UU No 15 tahun 2003 poin (c) dijelaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Menurutnya UU tersebut bisa diperluas pemahamannya karena terorisme saat ini sudah tidak dibatasi negara karena berdasarkan ideologi kekhalifahan dan menerapkan paham kekerasan. Dia menjelaskan, tujuan utama dari upaya revisi tersebut adalah memberikan sanksi tegas terhadap warga negara Indonesia yang ikut bergabung dengan organisasi teroris di luar negeri bisa dicabut kewarganegaraannya. BNPT belum bisa melakukan itu karena adanya pemahaman yang terbatas dari pasal tersebut.

Upaya Antisipasi

Setelah AS, Rusia dan Eropa terseret dengan konflik di Timur Tengah ini, maka tidak menutup kemungkinan negara-negara Asia seperti Indonesia juga akan ditarik untuk terlibat. Indonesia telah pernah menjadi sasaran aksi terorisme oleh karena itu harus berupaya lebih serius mencegahnya. Ini merupakan tantangan bagi Indonesia sebagai negeri dengan jumlah Muslim terbesar untuk berperan dalam skenario konflik global ini.

Mayoritas negara yang mengalami aksi terorisme, cenderung untuk menerapkan tindakan antiterorisme berupa penggunaan kekuatan militer atau pendekatan "*search and destroy*". Hal ini lumrah, sebab tindakan militer

akan mengirimkan pesan politik yang jelas kepada para pelaku terorisme bahwa negara akan menerapkan sanksi yang tegas terhadap semua tindakan terorisme. Keadaan ini membuat terorisme tersekuritisasi dan dengan demikian memberikan legitimasi terhadap negara untuk menerapkan pendekatan yang sifatnya statis. Ironisnya, pendekatan *national security* dan cara-cara militeristik ini sebenarnya identik dengan penggunaan logika yang sama dengan terorisme itu sendiri, yaitu meneror dengan kekerasan. Memerangi terorisme dengan tindakan-tindakan yang berpusat pada negara (*state centric*) dan militeristik sama ibaratnya dengan memerangi api dengan api, kondisi yang pada akhirnya hanya akan menambah kebencian dan ketakutan terhadap entitas yang dipandang sebagai musuh.

Dalam Sidang ke-8 Asian Parliamentary Assembly (APA) dengan tema "*Promoting Peace, Reconciliation, and Dialogue in Asia*" di Kamboja bulan ini, mayoritas parlemen Asia menuduh Barat menggunakan standar ganda dalam melawan terorisme. Parlemen Indonesia menawarkan jalan dialog dan membangun toleransi untuk menjaga perdamaian di kawasan Asia yang kini tengah terimbas isu terorisme. Jalan dialog sesuai dengan keinginan Indonesia untuk menjalankan politik luar negeri di dalam koridor *multi-track diplomacy* yang condong pada penggunaan *soft power* dalam menangani suatu permasalahan.

Indonesia sendiri merupakan negara yang sering sekali menjadi contoh Islam yang damai. Upaya membangun dialog antar-umat beragama akan memperkuat kerja sama internasional dalam menghadapi terorisme berkedok agama. Dengan penekanan pada pengembangan konsultasi yang berbentuk kerja sama, dialog konstruktif di bidang politik dan keamanan, peningkatan *confidence building*, dan diplomasi dalam usaha bersama untuk menjaga keamanan internasional dari ancaman yang mungkin timbul akibat aksi terorisme. Keadaan damai dan sejahtera diharapkan dapat memperkecil ruang bagi terorisme untuk tumbuh.

Penutup

Indonesia sangat rentan untuk menjadi sasaran penyebaran terorisme fase baru. Upaya pencegahan tersebut harus dilakukan di antaranya dengan meningkatkan kerja sama internasional bidang pencegahan terorisme dan memperkuat perundang-undangan terkait pencegahan terorisme. Karena itu, DPR RI dituntut mampu mengikuti perkembangan situasi

terbaru dengan memperbarui dan memperkuat legislasi terkait penanggulangan terorisme.

Pemerintah Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan pasca-serangan teroris di Paris. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki latar belakang sejarah *Islamic States*. Infiltrasi radikalisme bisa menyusup ke setiap sisi kehidupan masyarakat dengan berbagai bentuk. Penanganan terorisme di Indonesia tidak boleh terbatas pada penanggulangan semata, tetapi harus pada pencegahan. Upaya antisipasi dalam pencegahan aksi teror di Indonesia secara persuasi dengan memberi pemahaman dan dialog agar masyarakat dapat meminimalisir adanya kesempatan tindakan teror. Masyarakat harus berperan aktif untuk melaporkan jika menemukan kejanggalan di sekitar lingkungannya.

Referensi

- "Hadapi IS, NATO tidak kirik Pasukan", *Suara Pembaruan*, 8 Desember 2015.
- "Waspadai Terorisme Fase Baru", *Kompas*, 9 Desember 2015.
- "Terorisme Global Propaganda Teror di Ranah Visual", *Kompas*, 9 Desember 2015.
- "AS bertekad hancurkan Islamic State", *Media Indonesia*, 8 Desember 2015.
- "Terorisme Memasuki Fase Racuni Pikiran", *Kompas*, 8 Desember 2015.
- "Obama pleads for patience on terror threat", *International New York Times*, 8 Desember 2015.
- "Serangan Darat, Perlu atau Tidak", *Kompas*, 7 Desember 2015.
- "BNPT Waspadai Tiga Kelompok Besar Teroris di Indonesia", *Suara Pembaruan*, 5-6 Desember 2015.
- "Terorisme Indonesia Tawarkan Jalan Dialog", *Kompas*, 10 Desember 2015.
- "Ajang Pamer Militer di Tanah Suriah", *Republika*, 9 Desember 2015.
- "BNPT Janji Revisi UU Terorisme", 9 Desember 2015, <http://utama.seruu.com/read/2015/12/09/265291/bnpt-janji-revisi-uu-terorisme>, diakses 15 Desember 2015.
- "BNPT Waspadai Tiga Kelompok Besar Teroris di Indonesia", *Suara Pembaruan*, 5-6 Desember 2015.
- "Arab Saudi Bentuk Koalisi Antiterorisme 34 Negara", *Media Indonesia*, 16 Desember 2015.
- "Aliansi Militer Negara Muslim Pernyataan Saudi Dinilai Tidak Akurat", *Suara Pembaruan*, 16 Desember 2015.